



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.4040>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

EVALUASI PROGRAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI MELALUI SISTEM E-WARUNG DI KOTA TOMOHON

Femmy M. G. Tulusan; Novie R. Pioh; Joorie M. Ruru; Novva N. Plangiten,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi^{1,2,3,4}

femmytulusan@unsrat.ac.id¹, noviepioh@unsrat.ac.id², joorieruru@unsrat.ac.id³

novvaplangiten@unsrat.ac.id⁴

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 24 Agustus 2023

Revised date: 09 September 2023

Accepted date: 20 Oktober 2023

ABSTRACT

Social assistance programs through non-cash food in the form of e-shops are carried out by the government in solving food needs. The poor in Tomohon City are part of the target of this policy. This research was conducted to identify and analyze non-cash food assistance distribution programs through the e-Warung System in a policy evaluation study in Tomohon City. This study uses qualitative methods with the main objective of being descriptive and revealing (to describe and explore). Data was collected through interviews with target informants, direct observation and secondary data collection directly in the field or through the use of Google Scholar. Data analysis uses an interactive model which consists of three main things, namely data reduction, data presentation, conclusion/verification. The research findings are that the implementation of social assistance programs through non-cash food in e-warungs is still not in line with policy objectives. Evaluation needs to be done so that the pattern of program implementation fits the policy objectives. Improvement efforts must begin with evaluating the implementation of the program.

Keywords: Program Evaluation; Food Aid; e-Warung system.

ABSTRAKSI

Program bantuan sosial melalui pangan non tunai secara e-warung dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian kebutuhan pangan. Masyarakat miskin di Kota Tomohon menjadi bagian dari target kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan identifikasi dan analisis program penyaluran bantuan pangan non tunai melalui Sistem e-Warung dalam kajian evaluasi kebijakan di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap (to describe and explore). Data dikumpulkan melalui wawancara kepada target informan, observasi secara langsung dan pengumpulan data sekunder secara langsung di lapangan maupun melalui penggunaan *google scholar*. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan /verifikasi. Temuan penelitian bahwa pelaksanaan program bantuan sosial melalui pangan non tunai secara e-warung masih belum sesuai dengan tujuan kebijakan. Evaluasi perlu dilakukan agar pola pelaksanaan program tepat sebagaimana tujuan kebijakan. Upaya perbaikan harus diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program.

Kata Kunci : Evaluasi Program; Bantuan Pangan; Sistem e-Warung.

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam upaya penyelesaian kemiskinan di Indonesia telah melaksanakan berbagai program kerja. Program yang dilakukan yaitu bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial non Reguler seperti Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan

Bantuan Beras 10 Kg (<https://www.kemenkopmk.go.id/>). Pemerintah juga berupaya menjaga kesetabilan harga kebutuhan dan ketersediaan pokok pemenuhan kebutuhan (<https://kominfo.go.id/>). Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin mengalami peningkatan dan membebani keuangan negara. Alokasi anggaran pada program perlindungan sosial sebesar Rp. 372.5

Triliun (APBN 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/>). Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga dengan anggaran Rp 37,4 triliun. Program kartu sembako untuk 20 juta dengan anggaran Rp 43,6 triliun. Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang dimana insentif pasca pelatihan sebesar Rp. 600.000,- selama 4 bulan. Pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA dengan anggaran Rp3,5 triliun (<https://kominfo.go.id/>).

Salah satu mekanisme penyaluran bantuan sosial yang digunakan oleh pemerintah yaitu melalui program e-Warung. Program e-Warung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016. Program ini dilaksanakan untuk menggantikan pendistribusian sembako kepada masyarakat kurang mampu yang banyak mengalami kendala. Program ini diharapkan dapat melancarkan pendistribusian dan membuat masyarakat jadi mandiri dan sejahtera. Sejak dilaksanakan tahun 2017 sampai dengan saat ini ternyata banyak permasalahan yang dihadapi terkait dengan program e-Warung. Permasalahan antara lain terkait dengan kesiapan e-warung yang belum merata di sejumlah daerah dan data penerima bantuan yang masih perlu divalidasi. Masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan untuk melakukan registrasi. Pengelola e-Warung yang menjual bahan pokok tidak merujuk pada harga pasar, melayani masyarakat tidak sesuai dengan jenis barang yang ditentukan serta tidak sesuai dengan identitas pada kartu e-warung. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 telah menangani 55 kasus penyalagunaan dana bantuan sosial (Ali, 2019; Adi, 2020; Sianturi. dkk, 2021; Afringgo. dkk, 2021; Nurhasan, dkk. 2021; Husna. dkk, 2021; Nabila. dkk, 2021; <https://www.kemenkopmk.go.id/>; <https://manadopost.jawapos.com/>).

Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara juga mengimplementasikan program bantuan pangan non tunai bagi masyarakat miskin (<https://tomohon.go.id/>). Data jumlah penduduk miskin di Kota Tomohon yang tersebar di 44 kelurahan dalam 5 kecamatan yaitu tahun 2018 sebesar 5.95% dari jumlah 105.306 jiwa, tahun 2019 sebesar 5.62% dari jumlah penduduk 106.917 dan tahun 2020 sebesar 6.60% dari jumlah 100.586 jiwa (<https://tomohonkota.bps.go.id/>). Penduduk inilah yang menjadi kelompok sasaran dari pelaksanaan program bantuan pangan non tunai pemerintah Kota Tomohon. Bantuan pangan non tunai dilakukan

melalui e-warung. Dinas Sosial Kota Tomohon yang berkerjasama dengan perbankan untuk pelaksanaan e-warung. Permasalahan sebagaimana terjadi di daerah lain (Ali, 2019; Adi, 2020; Sianturi. dkk, 2020; Afringgo. dkk, 2021; Nurhasan, dkk. 2021; Husna. dkk, 2021; Nabila. dkk, 2021; <https://www.kemenkopmk.go.id/>) juga terjadi di Kota Tomohon. Program bantuan pangan non tunai melalui sistem e-Warung merupakan bagian dari program bantuan sosial. Olehnya perlu dilakukan evaluasi secara ilmiah melalui penelitian agar ditemukan pola pengelolaan yang tepat sebagaimana tujuan kebijakan. Gangguan pada upaya pencapaian tujuan kebijakan penting diselesaikan. Sebab program ini merupakan bagian dari meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan secara khusus dengan tujuan yaitu melakukan identifikasi dan analisis atas program penyaluran bantuan pangan non tunai melalui Sistem e-Warung dalam kajian evaluasi kebijakan di Kota Tomohon. Dari hasil identifikasi dan analisis maka akan dibuatkan pola penggunaan Sistem e-Warung yang sesuai dengan karakteristik masyarakat miskin di Kota Tomohon terkait dengan Sistem e-Warung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap (to describe and explore). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif yaitu melakukan identifikasi dan analisis atas program penyaluran bantuan pangan non tunai melalui Sistem e-Warung dalam kajian evaluasi kebijakan di Kota Tomohon. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial serta pemerintah kelurahan dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai dalam wilayah pemerintahan Kota Tomohon. Untuk mendapatkan data dalam rangka analisis maka akan dilakukan wawancara kepada pimpinan Dinas Sosial serta Pemerintah Kelurahan dan masyarakat penerima bantuan. Untuk mendukung kelancaran wawancara maka disusun terlebih dahulu panduan wawancara yang berisikan topik – topik pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan. Demikian pula halnya dengan kegiatan observasi akan juga diikuti dengan penyusunan point – point yang menjadi fokus kegiatan observasi. Observasi dilakukan secara langsung tentang mekanisme dan standart penggunaan system e-warung dalam penerimaan bantuan sebagaimana yang

dikemukakan diatas. Peneliti juga akan melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan aturan maupun dokumen lainnya baik secara langsung di lapangan maupun melalui penggunaan google scholar dalam penelusuran publikasi ilmiah yang dapat menunjang kebutuhan data penelitian. Dalam melakukan analisis data kualitatif peneliti menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu: (1) reduksi data (2) Penyajian data; Dan (3) penarikan kesimpulan /verifikasi (Sugiono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai dengan saat ini kemiskinan masih menjadi fokus permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara terpadu. Sekalipun telah banyak terobosan melalui kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah (Subhan, et.al; 2022). Tahun 2021 penduduk Indonesia yang berada dalam kategori kemiskinan berjumlah 26,50 juta orang. Sementara tahun 2022 berjumlah 26,36 juta orang. Menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara pada tingkat kelaparan berdasarkan Global Hunger Index (GHI). Global Hunger Index (GHI) memberikan penilaian tentang tingkat kelaparan penduduk suatu negara terkait dengan kebutuhan dasar fisiologis manusia yaitu kebutuhan pangan/makanan dan nutrisi seperti anak yang kurang gizi, kurus, *stunting* sampai dengan kematian anak (<https://databoks.katadata.co.id/>).

Kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar terkait dengan kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Badan Pusat Statistik dalam menentukan masyarakat kategori miskin salah satunya terkait dengan kebutuhan pokok untuk makanan. Kemiskinan dalam kategori Kementerian Sosial yaitu tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013). Penyelesaian masalah kemiskinan dilakukan oleh pemerintah melalui program bantuan sosial. Salah satu program bantuan sosial yaitu program bantuan pangan non tunai. Program e-Warung ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016. Program bantuan pangan non tunai melalui sistem e-warung memiliki kesamaan dengan program perlindungan sosial yang dikenal secara internasional sebagai conditional cash transfers

(CCT). Model program secara internasional ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya masalah kemiskinan kronis (Subhan, et.al; 2022; Masino & Miguel, 2018; Setyaningrum, 2022). Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia, Program bantuan pangan non tunai melalui sistem e-warung tidak seperti conditional cash transfers (CCT).

Dinas sosial Daerah Kota Tomohon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomo 9 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon. Dinas Sosial Kota Tomohon menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Tomohon, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tomohon sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Tomohon dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Tomohon serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tomohon, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Mekanisme penyaluran Sembaku ini berdasarkan Buku Panduan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam buku panduan ini dijelaskan bahwa perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih.

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan stunting. Besaran manfaat program Sembako untuk bulan Januari-Februari 2020 adalah Rp150.000/KPM/bulan. Sebagai JPS dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19, maka sejak bulan Maret 2020 Pemerintah menaikkan besaran manfaat program Sembako menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong.

Garis kemiskinan Kota Tomohon tahun 2020 dalam perhitungan rupiah berada pada point 422.746. Data ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 pada point 439 587 dan tahun 2018 pada point 363 865 data ini lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara pada point 391 197 pada tahun 2020. Demikian pula jika dilihat dari data jumlah penduduk miskin berada pada angka 6,06 ribu jika di tahun 2020 dengan tingkat prosentasi yaitu 5.60% sebagaimana data yang diperoleh dari BPS Kota Tomohon (<https://tomohonkota.bps.go.id/>).

Data tersebut diatas memberikan makna bahwa perlu adanya program dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Tomohon. Sebab telah menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Demikian pula halnya ketika Indonesia diperhadapkan pada pandemi

Covid 19. Kondisi ekonomi negara turut mengalami guncangan dan terasa sampai pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada kondisi yang demikian maka terjadi peningkatan penduduk miskin jadi lebih meningkat.

Untuk dapat membantu masyarakat dalam situasi pandemic Covid 19 maka pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 melaksanakan program bantuan sembako. Program ini dilakukan untuk masyarakat Indonesia dengan menggunakan data yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SKS-NG). Pemerintah Kota Tomohon turut menjadi bagian dari penerimaan program sembako tahun 2020 yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masyarakat penerima sebagaimana Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SKS-NG) terdapat ketidakcocokan dengan data penduduk miskin milik Pemerintah Kota Tomohon dan juga ada yang berbeda dengan kondisi sebenarnya di tingkat kelurahan. Terdapat masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan akan tetapi tidak termasuk dalam daftar penerima. Akan tetapi juga terdapat penduduk yang seharusnya bukan penerima tapi terdata sebagai penerima. Ditemukannya juga terdapat tidak validnya data penerima karena sudah ada yang meninggal dan ada yang pindah domisili. Permasalahan lainnya juga ditemukan ada penerimaan manfaat yang saldo rekeningnya korong. Agen e-warung sebagai bagian dari unsur pelaksana ternyata juga menjual bahan lebih tinggi dari harga pasar, kualitas barang yang dijual kurang baik. Data lapangan juga ternyata penerima manfaat menggadaikan kartu dengan alasan membayar hutang. Agen warung memberikan bahan yang tidak terdapat dalam jenis barang yang dapat dibeli berdasarkan aturan serta juga kurangnya sosialisasi berkaitan dengan program sembako sehingga menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Program bantuan pangan non tunai melalui sistem e-Warung yang memiliki anggaran sangat besar perlu diperbaiki permasalahannya. Upaya perbaikan harus diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program. Telaah evaluasi dilakukan agar ditemukan pola pengelolaan yang

tepat sebagaimana tujuan kebijakan. Melalui proses evaluasi maka akan ditemukan akar penyebab permasalahan dan mekanisme yang dapat dilakukan untuk perbaikan. Sebab jika program ini terus berjalan dan tidak ditemukan akar masalah serta rekomendasi perbaikan maka upaya penanganan kemiskina tidak akan terselesaikan. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan program bantuan pangan non tunai maupun penerapan sistem e-warung. Kajian – kajian tersebut dapat ditemukan dari penelitian yang dilakukan Ali, (2019); Adi, (2020); Sianturi. dkk, (2020); Afringgo. dkk, (2021); Nurhasan, dkk. (2021); Dwita dan Megawati (2022). Akan tetapi belum ditemukan penelitian yang secara khusus melakukan pengkajian dalam aspek evaluasi program. Disinilah kebaruan dan perbedaan mendasar dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian terkait dengan evaluasi program merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki isi kebijakan dan pola implementasi kebijakan. Melalui penelitian evaluasi kebijakan ini maka kesalahan – kesalahan dalam isi kebijakan dan pola implementasi program bantuan pangan non tunai melalui sistem e-warung terselesaikan. Berhasil atau tidaknya program bansos pangan sendiri sangat ditentukan oleh enam aspek diantaranya yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat harga, (Yunus, 2019). Lester dan Stewart dalam (Leo Agustino, 2008) menerangkan jika evaluasi berguna untuk mengetahui kegagalan dan kekurangan suatu kebijakan dan berguna untuk mengetahui apakah kegiatan yang dirancang dan dijalankan dapat memberikan dampak yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan sejatinya tidak semua program kebijakan public mampu mencapai hasil atau meraih maksud dan tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya, sehingga dengan melakukan evaluasi dapat melihat sejauh mana kesenjangan antara pencapaian yang didapat dengan harapan yang dibangun dari sebuah kebijakan public. Dalam melakukan pengukuran evaluasi kebijakan tersebut Bridgman dan Davis (2000) mengemukakan empat indikator pokok evaluasi kebijakan yaitu: a. Indicator Input, berisikan penilaian mengenai bahan-bahan dasar dan sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi latar belakang kebijakan, sumber daya manusia, uang dan

infrastruktur pendukung lainnya. b. Indicator Process, berisikan penilaian mengenai bagaimana sebuah kebijakan tersebut dijalankan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari aspek efisiensi dan efektivitas dari cara atau metode yang diterapkan dalam menjalankan kebijakan public. c. Indicator Outputs, berisikan penilaian mengenai produk dan hasil yang didapatkan dari proses pelaksanaan kebijakan public. Hal tersebut dapat diketahui dari berapa banyak orang yang sudah berhasil mengikuti program kebijakan. d. Indicator Outcomes, berisikan penilaian mengenai dampak yang dirasakan dan diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Hal tersebut diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh Subarsono dalam (Winarta et al, 2020) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni: (1) Mengukur tinggi rendahnya efisiensi kebijakan. (2) Menentukan tinggi rendahnya kinerja kebijakan. (3) Mengukur tinggi rendahnya keluaran (outcome) kebijakan. (4) Mengetahui terjadinya penyimpangan. (5) Mengukur dampak yang muncul dari adanya suatu kebijakan. (6) Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang selanjutnya. Model evaluasi formatif dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu pada saat implementasi program sedang berjalan untuk perbaikan atau meningkatkan hasil menurut Scriven dalam (Muryadi, 2007).

KESIMPULAN

Kemiskinan masih menjadi masalah pemerintah sampai dengan saat ini. Sehingga dipandang sangat serius untuk diselesaikan secara ilmiah melalui proses penelitian. Anggaran negara yang digunakan pada penyelesaian kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sangat besar dan banyak diperhadapkan dengan masalah dan kendala. Penggunaan sistem e-Warung dalam program penyaluran bantuan pangan non tunai belum juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melalui aktivitas penelitian teridentifikasi dan teranalisis pola penggunaan Sistem e-Warung yang sesuai dengan karakteristik masyarakat miskin di Kota Tomohon terkait dengan Sistem e-Warung. Program bantuan sembako merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. data penerima program menunjukkan terdapat ketidak

sesuaian pada beberapa data karena belum sinkronya data dalam aplikasi SIKS-NG dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon serta data rill di kelurahan menyangkut status kependudukan. Kelompok sasaran yang menggunakan kartu pembelian di e-warung tidak sesuai dengan peruntukannya terjadi karena kurangnya pengawasan. pendamping program belum dapat secara tepat melakukan pendampingan dalam pembelanjaan dan control atas semua proses yang terjadi di tingkat kelurahan bagi KPM maupun agen e-warung. Demikian pula halnya dengan agen e-warung yang masih ditemukan melanggar aturan dalam penjualan berkaitan dengan harga, kualitas dan bentuk pembelanjaan yang dilayani. program sembako telah mendukung dari aspek ekonomi dalam meringankan pengeluaran, memenuhi kebutuhan pokok serta menggarakkan sector UMKM melalui aktivitas usaha pembelanjaan. Secara politik program sembako sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat secara langsung, mengaktifkan lembaga politik dalam menunjang program pemerintah dan menjadi contoh bagi lembaga politik dalam menyalurkan bantuan saat terjadi pandemi Covid 19.

REFERENCES

- Adi. Fajarwati Kusuma. 2020. Terobosan E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34. Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 1, Nomor 1, Juni 2020 (71-90).
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Ali. R. E. S. 2019. Dampak Program E-Warung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2017. JOM FISIP Vol. 6 : Edisi II (1-15).
- Afringgo. R, Nurmasari dan Evi Zubaidah. 2021. Efektifitas E-Warung sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer Vol. 1 No.1 Tahun 2021 (22-29).
- Bridgman, J & Davis G. 2000. Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW.
- Dwita. A dan Megawati. S, 2022. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Publika. Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022, 175-190. DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p175-190>
- Husna.H, Ariayani.E dan Azwari.T, 2021. Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 3 Nomor 1, Januari – Juni 2021 (57 – 63). <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>.
- Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Masino. S & Miguel Niño-Zarazúa, 2018. Improving Financial Inclusion through the Delivery of Cash Transfer Programmes: The Case of Mexico's Progresa-Oportunidades-Prospera Programme, The Journal of Development Studies, (151-168) <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1546845>.
- Muryadi, A. D. 2017. Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. Jurnal Ilmiah Penjas. 3(1), 1–16
- Nabila.K, Suharso.P dan Hartanto.W, 2021. Implementasi Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial. Volume 15 Nomor 2

- (2021). DOI: 10.19184/jpe.v15i2.21327.
- Nurhasan. R, Kusrin dan Hanny Purnamasari. 2021. Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Waroeng Kepada Masyarakatdesa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 7, No.8, (274-283).
- Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Setyaningrum. Tri, 2022. Analysis Of The Effect Of Cct, Financial Literature And Financial Technology On Financial Inclusion In Banyumas District (Study on Conditional Cash Transfers Beneficiary family in Banyumas Regency). [Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE 2022, 10-11 August 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia. http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320980.](https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320980)
- Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung : Alfabeta
- Sianturi.R.R, Batubara.B.M dan Angelia.N. 2021. Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(2) (185-191). DOI: 10.31289/strukturasi.v3i2.749.
- Subhan. E.S, Rudijanto. E. T. D and Puji Handayati. 2022. Comparative Study of Cash Based and Non Cash Distributions in the Household Program (PKH) in Tekasire Village, Manggelewa District. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, No 1 (412-425). DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3619>
- Tulusan F. M. G., Londa. V. Y., dan Plangiten. N. N. 2019. Perilaku Kelompok Masyarakat Daerah Bantaran Sungai di Kota Manado. Laporan Akhir Penelitian. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Tulusan F. M. G., Ruru. J. M., dan Plangiten. N. N. 2020. Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Bantaran Sungai Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
- Tulusan. F.M.G, Tampi.G.B dan Palar. N.R.A. 2021. Penerapan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Umat Katolik di Manado Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Akhir Penelitian. Manado : LPPM Unsrat.
- Tulusan. F.M.G, Rorong.A.J dan Plangiten. N. N. 2022. Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Pusat Perbelanjaan Kota Manado. Laporan Akhir Penelitian. Manado : LPPM Unsrat.
- Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 28–42.
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. REFORMASI: Jurnal

Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
9, 138–152

Sumber Elektronik:

<https://www.kemenkopmk.go.id/>

<https://kominfo.go.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://databoks.katadata.co.id/>

<https://tomohonkota.bps.go.id/>